



**PIDATO  
GUBERNUR DKI JAKARTA  
PADA ACARA  
RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA  
DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020,  
DAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D  
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Kamis, 29 Juli 2021**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk semuanya.

Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda;
- Wakil Gubernur DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah*** tentang:

- ***Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan***
- ***Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022.***

## **Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Pada kesempatan pertama, izinkan saya menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* Tahun Anggaran 2020.

Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan dampak luar biasa pada hidup (*life*) dan kehidupan (*livelihood*). Pandemi ini menuntut peran pemerintah untuk melakukan intervensi di berbagai sektor, terutama di kesehatan dan jaring pengaman sosial. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga mengakibatkan pengurangan drastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena berhentinya roda ekonomi akibat pandemi.

Oleh sebab itu, 2 hal utama dapat digarisbawahi dalam pelaksanaan APBD 2020 ini. Pertama adalah realisasi anggaran untuk menangani krisis pandemi COVID-19 terutama dalam bentuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang diperuntukkan untuk sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial. Kedua adalah efisiensi dari APBD 2020 yang nilainya berkurang drastis akibat pandemi. Efisiensi ini dapat dilihat dari realisasi belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL) yang sudah dianggarkan.

Secara umum, APBD meliputi *Pendapatan Daerah, Belanja Daerah* dan *Pembiayaan Daerah*.

*Pendapatan Daerah* tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.57,23 triliun, dan terealisasi sebesar Rp.55,89 triliun atau 97,65%. Komponen pendapatan daerah tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp.37,41 triliun atau 98,24% dari target Rp.38,08 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Daerah Rp.31,89 triliun atau 98,20% dari target Rp.32,48 triliun;
  - Retribusi Daerah Rp.496,33 miliar atau 105,96% dari target Rp.468,41 miliar;
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.672,49 miliar atau 79,63% dari target Rp.844,47 miliar;
  - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp.4,35 triliun atau 101,34% dari target Rp.4,29 triliun.
2. Pendapatan Transfer terealisasi Rp.16,96 triliun atau 99,09% dari target Rp.17,11 triliun; dan
  3. Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi Rp.1,51 triliun atau 74,35% dari target Rp.2,03 triliun.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Pada bagian berikut, saya akan menyampaikan penjelasan tentang realisasi **Belanja Daerah** yang terdiri dari:

- Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp.29,01 triliun atau 86,23% dari anggaran Rp.33,65 triliun; dan
- Realisasi Belanja Langsung Rp.23,06 triliun atau 91,19% dari anggaran Rp.25,29 triliun.

Salah satu komponen dari Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Tidak Terduga. Pada tahun anggaran 2020 Pemprov DKI Jakarta melakukan *refocusing* anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 diantaranya melalui perubahan anggaran Belanja Tidak Terduga, dari sebesar Rp.188,90 miliar menjadi Rp.5,52 triliun. Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran

2020 adalah sebesar Rp.4,70 triliun atau 85,27% yang terdiri dari realisasi untuk bidang kesehatan Rp.918,61 miliar dan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) sebesar Rp.3,78 triliun.

Belanja Langsung di antaranya digunakan untuk pelaksanaan program prioritas sesuai dengan 5 Misi dalam RPJMD 2017-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Program Prioritas pada Misi pertama yaitu, Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan dengan hasil, antara lain sebagai berikut:
  - Program pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dari anggaran Rp.3,30 triliun terealisasi Rp.3,11 atau 94,31%;
  - Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dengan anggaran Rp.2,12 triliun terealisasi Rp.1,99 triliun atau 94,08%;
  - Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan anggaran Rp.1,93 triliun terealisasi Rp.1,60 triliun atau 83,26%;
  - Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dengan anggaran Rp.1,52 triliun terealisasi Rp.1,42 triliun atau 93,38%; dan
  - Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp.1,39 triliun terealisasi Rp.1,34 triliun atau 96,63%.

2. Program Prioritas pada Misi kedua yaitu, Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang, dengan hasil antara lain sebagai berikut:
  - Program Pengendali Banjir dan Abrasi dari anggaran Rp.1,74 triliun terealisasi Rp.1,30 triliun atau 74,52%;
  - Program Pengelolaan Persampahan dari anggaran Rp.1,34 triliun terealisasi Rp.1,29 triliun atau 96,31%;
  - Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan dari anggaran Rp.1,08 triliun terealisasi Rp.908,13 miliar atau 83,76%;
  - Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat dari anggaran Rp.451,90 miliar terealisasi Rp.406,03 miliar atau 89,85%; dan
  - Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan dari anggaran Rp.272,01 miliar terealisasi Rp.241,24 miliar atau 88,69%.
3. Program Prioritas pada Misi ketiga, yaitu Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas, dengan hasil antara lain sebagai berikut:
  - Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dianggarkan sebesar Rp.120,71

miliar dan terealisasi sebesar Rp.109,44 miliar atau 90,66%;

- Program Penataan Administrasi Kependudukan dianggarkan sebesar Rp.85,72 miliar dan terealisasi sebesar Rp.82,98 miliar atau 96,73%;
  - Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah dianggarkan sebesar Rp.23,65 miliar dan terealisasi sebesar Rp.21,48 miliar atau 90,82%;
  - Program Pengembangan Kompetensi SDM dianggarkan sebesar Rp.16,21 miliar dan terealisasi sebesar Rp.14,32 miliar atau 88,35%; dan
  - Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp.16,10 miliar dan terealisasi sebesar Rp.15,73 miliar atau 97,71%.
4. Program Prioritas pada Misi keempat, yaitu Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial, dengan hasil antara lain sebagai berikut:
- Program Pengelolaan Pertamanan dianggarkan sebesar Rp.388,07 miliar dan terealisasi sebesar Rp.374,60 miliar atau 96,53%;
  - Program Pengelolaan Pemakaman dianggarkan sebesar Rp.329,33 miliar dan terealisasi sebesar Rp.293,83 miliar atau 89,22%; dan
  - Program Penataan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp.36,99 miliar dan terealisasi sebesar Rp.34,40 miliar atau 93,00%.

5. Kemudian program Prioritas pada Misi kelima, yaitu Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan, dengan hasil di antaranya:
- Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan anggaran sebesar Rp.8,02 miliar dan terealisasi sebesar Rp.7,93 miliar atau 98,87%; dan
  - Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp.4,68 miliar dan terealisasi sebesar Rp.4,64 miliar atau 99,26%.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Berikutnya saya akan menjelaskan tentang realisasi *Pembiayaan Daerah* yang terdiri dari:

- Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp.5,58 triliun, yang di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2020; dan
- Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.4,21 triliun, di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada PAM Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, Perumda Pasar Jaya, dan PD PAL Jaya.

Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dijelaskan, maka diperoleh *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)* Tahun 2020 sebesar Rp.5,16 triliun.



Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi *Neraca Daerah* dan *Arus Kas*.

- Neraca Daerah yang disajikan memuat informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020. Secara garis besar dapat saya sampaikan posisi Neraca Daerah per 31 Desember 2020 terdiri dari Aset sebesar Rp.520,36 triliun, Kewajiban sebesar Rp.15,10 triliun dan Ekuitas sebesar Rp.505,23 triliun.
- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. Secara umum dapat saya sampaikan Arus Kas periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.3,97 triliun yang terdiri dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

*Alhamdulillah* berkat doa dan kerja keras kita bersama, Hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, BPK memberikan opini "*Wajar Tanpa Pengecualian*", ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, kami terus melakukan upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel antara lain, yaitu:

- *Pertama*, Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai tindak lanjut

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- **Kedua**, Peningkatan akuntabilitas penatausahaan belanja BOS dan BOP sekolah;
- **Ketiga**, Pembenhahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah, penyelesaian aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;
- **Keempat**, Melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal yang saya sampaikan dalam pidato ini, disajikan pada buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

**Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Pada bagian terakhir, izinkan saya menyampaikan penjelasan mengenai **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022** sebagai berikut.

Sebagai respon atas pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam sejak Maret 2020, strategi pembangunan Kota Jakarta harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan akan perubahan mobilitas penduduk yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Saat ini kehidupan Jakarta harus dapat beradaptasi dengan kondisi kehidupan *new normal*. Pada masa selanjutnya diharapkan pembangunan Kota Jakarta memasuki fase kehidupan normal masa depan (*future normal*) dengan mengutamakan

penyediaan pelayanan dasar perkotaan berketahanan dan tangguh (*resilient basic services*) terhadap bencana alam maupun non alam di masa mendatang.

Proses perubahan RPJMD tahun 2017-2022 bertujuan untuk melaksanakan amanat pengendalian dan evaluasi terhadap ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mewujudkan perencanaan pembangunan yang tanggap dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional, serta pemulihan dan pematapan pembangunan pasca pandemi COVID-19.

Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta juga didasari oleh resesi yang terjadi akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ekonomi Jakarta mengalami kontraksi hingga minus 8,33 persen (*y-on-y*), yang kemudian berangsur membaik mencapai minus 3,89 persen (*y-on-y*) pada triwulan III dan minus 2,14 persen (*y-on-y*) pada triwulan IV, yang menandakan bahwa perekonomian Jakarta masih berada di bawah tingkat normal.

Perubahan kebijakan nasional yang diakomodir dalam Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta yakni Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Selanjutnya, dalam rangka memastikan agar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen *Sustainable Development Goals (SDGs)* terintegrasi dengan baik, Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dilengkapi juga dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah melalui proses validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **Rapat Dewan yang saya hormati,**

Pada bagian berikut, perkenankan saya untuk menyampaikan secara garis besar penyesuaian-penyesuaian yang tertuang dalam Raperda Perubahan RPJMD ini.

- 1) Reorientasi arah kebijakan pembangunan melalui Pemantapan atas visi dan kebijakan pembangunan Kota Jakarta antara lain:
  - Perencanaan ruang berbasis *neighbourhood* yang mengutamakan keterjangkauan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan tanpa perlu menempuh jarak yang jauh;
  - Fasilitas dan layanan dasar kota yang berketahanan;
  - Peningkatan infrastruktur digital sebagai pondasi dari tata kelola pemerintahan modern yang berbasis data dan teknologi;
  - Integrasi data kependudukan untuk menghasilkan intervensi sosial yang tepat sasaran; dan
  - Reformasi dunia ekonomi dengan mendorong industri berbasis pengalaman dan nilai tambah.

- 2) Penyesuaian asumsi makro yang disusun berdasarkan masukan dari Bank Indonesia, BPS DKI Jakarta serta INDEF diantaranya:
  - Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai kisaran 5,8-6,2 persen pada tahun 2022, dan terkendalnya laju inflasi pada kisaran angka 3+1 persen;
  - Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan mencapai 10,38 persen; dan
  - Tingkat Kemiskinan meningkat namun diupayakan untuk tetap terkendali di angka 3,45 persen.
- 3) Penyesuaian indikator dan target kinerja pembangunan pada periode 2020 hingga 2022. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 tidak mengalami perubahan. Penyesuaian diutamakan untuk indikator kinerja yang paling terpengaruh kondisi sosio-ekonomi yang memburuk dan kontraksi anggaran.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan Visi Misi pembangunan DKI Jakarta tidak dapat dilaksanakan oleh Jakarta sendiri melainkan perlu dilakukan kolaborasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten sekitar serta seluruh potensi masyarakat baik dari kalangan akademisi, dunia usaha maupun komunitas.

Sebagai penutup dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini, saya berharap bahwa melalui upaya bersama, kita dapat mewujudkan Jakarta menjadi kota berketahanan yang maju dan berdaya saing serta dihuni oleh warga yang bahagia.

**Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Demikian penyampaian secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022*, Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan terhadap pidato yang saya sampaikan.

Saya harapan, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Rancangan Peraturan Daerah ini serta dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.

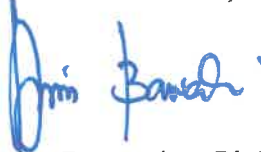
Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-Nya, dalam rangka mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 29 Juli 2021

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D